BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perkawinan paksa yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah atau "*married by accident*" adalah fenomena yang sering kali dipaksakan untuk tujuan menjaga nama baik keluarga dan masyarakat. Perkawinan paksa yang disebabkan oleh MBA merupakan praktik yang masih terjadi di beberapa komunitas, termasuk Jemaat Ba'tan. Praktik ini didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial yang terkait dengan kehamilan di luar nikah.

Perkawinan paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan tetapi juga dapat menimbulkan masalah psikologi serta sosial yang serius. Sehingga sangat pentingnya untuk menekankan penting mereformasi praktik perkawinan paksa dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kebebasan individu yang bersangkutan.

Teologi Feminisme Marxis menawarkan pendekatan kritis dan transformatif dalam menghadapi isu perkawinan paksa, khususnya dalam konteks "*Married by Accident*" (MBA). Dengan menggabungkan analisis sosial-ekonomi Marxis dan kritik feminis terhadap patriarki, teologi ini menyoroti bagaimana struktur kekuasaan yang ada baik dalam masyarakat maupun institusi atau adat yang berlaku, sering kali menindas perempuan dan memaksa mereka ke dalam situasi yang tidak mereka inginkan.

Perkawinan paksa ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, yang menganggap perkawinan sebagai perjanjian suci yang harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua belah pihak, tetapi juga melanggar hak asasi individu, terutama perempuan yang sering kali dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan penuh.

Dalam upaya merekonstruksi praktek perkawinan yang lebih adil, teologi Feminisme Marxis menekankan pentingnya kesetaraan gender, penolakan terhadap norma-norma patriarkal, serta pemberdayaan perempuan melalui akses yang setara. Selain itu, teologi ini mendorong perubahan dalam hukum dan adat yang selama ini memperkuat praktek perkawinan paksa, sekaligus mengadvokasi dukungan yang lebih besar terhadap korban.

Teologi Feminisme Marxis tidak hanya menawarkan kritik terhadap praktik perkawinan paksa, tetapi juga memberikan visi alternatif untuk membangun hubungan perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Implementasi teologi ini dalam gereja dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang menghormati hak-hak perempuan dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas menuju kesetaraan gender.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dari kesimpulan maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1 . Pemangku adat

sebaiknya melakukan evaluasi terhadap adat dan tradisi yang berkaitan dengan perkawinan, terutama yang mengarah pada praktek perkawinan paksa. Adat yang berpotensi merugikan individu, terutama perempuan, harus dimodifikasi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan individu.

2 . Gereja

Sebaiknya memberikan bimbingan pastoral kepada pasangan dan keluarga yang menghadapi situasi perkawinan paksa. Gereja harus mendorong diskusi yang terbuka di mana pilihan lain selain perkawinan paksa dapat didiskusikan dan dibahas.

3 . Untuk korban perkawinan paksa

Khususnya bagi perempuan untuk lebih menjaga diri lagi agar terhindar dari kasus seperti perkawinan paksa. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang yang dipercaya. Bicarakan perasaan dan pengalaman terkait situasi tersebut. Tidak perlu menghadapinya sendirian, karena dukungan emosional dari orang-orang terdekat dapat sangat membantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini.